

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Alamsyah. (1997). *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Map UGM, Yogyakarta.
- Cahyat, A. (2004). *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number 3.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Griffith, Terri, Sawyer, Jhon E. and Neale, Margaret A. (1999). *Information Technology as a Jealous Mistress: Competition for Knowledge Between Individuals and Organization*.
- Hengky Latan dan Imam Ghozali. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SMARTPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husain Umar. (2008). *Desain Penelitian: Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ida Bagus Agung Dharmanegara. (2010). *Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imam Ghozali. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indriantoro, Nur.dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Persada.

- Murni, Sri dan Banu Witono. (2004). *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Perspektif*, Vol. 9.
- Mustopadidjaja. (2003). *Peran Aparatur Pengawasan Dalam Mencegah KKN, Beberapa Implikasi Pendekatan TQM*. Inspektorat Jenderal Pengawasan , Departemen Perikanan dan Kelautan . 16 September.
- Pakde Kartono. (2013, 24 Maret). Walikota dan Sekda Bandung Atur Kasus Bansos sejak Penyidikan dan Persidangan. *Kompasiana* [Online], halaman 1. Tersedia : <http://hukum.kompasiana.com>. [17 Juli 2013]
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Riduwan. (2012). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Saefullah, dan Ernie. (2005). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Shafritz, Jay M. dan E.W. Russell. (1997). *Introducing Public Administration*. New York: Longman.
- Singgih Santoso. (2011). *Structural Equation Modelling (SEM) Konsep dan Aplikasi AMOS 18*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Soekidjo Notoatmodjo . (2005). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetriono dan Rita Hanafie. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sopannah dan Mardiasmo. (2003). “*Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

- Sugiyono. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen (edisi pertama, cetakan pertama)*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Syahrudin dan Taifur, Werry Darta. 2002. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas.
- Truman, David B. 1960. *The Governmental Process: Political Interest and Public Opinion*. New York: Alfred A Knopf.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD.
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Werimon, S., Ghozali, I. dan Nazir, M. (2007). “ *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua)*”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Winarna Jaka dan Murni. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar.